

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan adalah indikator menjadi penyebab perubahan diri seseorang dikarenakan proses dalam pendidikan tentu akan diterima mulai dari seseorang itu baru lahir sampai meninggal dunia. Maka dari itu banyak sekali cara atau metode belajar baik yang diterima baik metode secara langsung maupun tidak langsung oleh para peserta didik. Ada 3 jenis pendidikan, yang pertama pendidikan informal, non formal maupun formal. Yang ketiganya memiliki ciri khas beserta fungsinya masing-masing melengkapi satu sama lain serta meningkatkan pengetahuan terhadap individu pada peserta didik. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan formal merupakan sebuah jalur pendidikan yang memiliki terstruktur, sistematis dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi.

Menurut Sudjana (2010) Pendidikan non formal merupakan bagian dari sekian banyak istilah-istilah yang muncul dalam studi kependidikan pada akhir tahun tujuh puluhan. Istilah tersebut muncul dan meningkat baik skala global bermula pada masa itu dikenal dengan, pendidikan pembaharuan, pendidikan abadi, sepanjang hayat, pendidikan massa, pendidikan masyarakat, pendidikan perluasan, pendidikan sosial, pendidikan informal, pendidikan orang dewasa, hingga pendidikan berkelanjutan.

Menurut Iskandar (2012) menyatakan bahwa suatu kebijakan dapat diartikan sebagai sebuah serangkaian baik rencana program, keputusan, aktivitas, aksi,

untuk bertindak maupun tidak bertindak, yang akan dilakukan oleh para pihak - pihak yang terkait, sebagai suatu tahapan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi. Penetapan kebijakan adalah sebuah faktor penting bagi setiap organisasi untuk mencapai yang ingin diraih.

Untuk lebih lanjut, kebijakan memiliki dua aspek menurut Thoha (2012) yakni: a) Kebijakan adalah suatu praktik sosial, kebijakan bukan acara yang tunggal atau terasing. Dengan demikian, kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan dan dirumuskan oleh pemerintah berdasarkan dari semua kejadian yang terjadi di kalangan masyarakat. Kejadian tersebut ini berkembang dalam praktika kehidupan kemasyarakatan, dan juga bukan merupakan peristiwa yang terjadi sendiri, tersolir, dan asing bagi masyarakat. b) Kebijakan merupakan suatu tindakan atas peristiwa yang sedang terjadi, baik untuk menciptakan kesesuaian dari pihak-pihak terkait yang bertikai, maupun menciptakan inisiatif atas kegiatan bersama, bagi para pihak yang terkait untuk mendapatkan perlakuan yang tidak logis atas usaha bersama tersebut.

Dengan demikian, kebijakan dapat dinyatakan sebagai upaya untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin diraih, sekaligus sebagai upaya pemecahan permasalahan dengan menggunakan strategi maupun sarana-sarana tertentu, dalam tahapan waktu yang telah ditentukan. Kebijakan rata-rata bersifat mendasar, karena kebijakan hanya menggariskan pedoman secara umum

sebagai landasan dalam hal bertindak untuk mencapai usaha dan tujuan yang telah ditentukan. Kebijakan bisa berasal dari seorang individu maupun sekelompok orang yang memuat serangkaian program/ aktivitas/ tindakan dengan tujuan tertentu. Kebijakan ini akan turut dilaksanakan oleh para pelaku (*stakeholders*) dalam rangka memecahkan permasalahan yang ada.

Direktorat Pendidikan Kesetaraan tahun 2010 Pendidikan Kesetaraan merupakan bagian dari pendidikan nonformal yang memberikan layanan pendidikan Program Paket setara SD, Program Paket B setara SMP dan Program Paket C setara SMA, dengan memberikan penekanan pada peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengembangan sikap kepribadian kepada peserta didik.

Pendidikan kesetaraan diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat melalui lembaga-lembaga seperti Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Pelatihan Kursus (IPK), Organisasi Sosial (Orsos), Organisasi Masyarakat (Ormas) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (ISM), dan Pondok Pesantren Bahkan, mulai tahun 2008 telah dibuka kesempatan lembaga kursus/pelatihan dapat turut serta menyelenggarakan pendidikan kesetaraan khususnya untuk percepatan peningkatan keterampilan peserta didik.

Sesuai dengan kebijakan Menteri Pendidikan Nasional Iulusan pendidikan kesetaraan mempunyai hak eligibilitas untuk meneruskan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik di lembaga pendidikan formal maupun nonformal, serta memiliki pengakuan yang sama ketika mereka

memasuki dunia kerja.

Dasar hukum untuk penyelenggaraan pendidikan kesetaraan khusus Paket C adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa seluruh warga Negara wajib mendapatkan pendidikan dan ayat (3) menegaskan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan dan mengusahakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan ketakwaannya dan keimanan beserta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 20 tahun 2003 mengenai sebuah sistem Pendidikan Nasional, Bagian kelima pendidikan Nonformal, Pasal 26 ayat (3) pendidikan nonformal mencakup, pendidikan anak usia dini, kecakapan hidup, pendidikan kepemudaan, pendidikan anak usia dini, pendidikan pelatihan kerja, pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan yang lainnya yang ditujukan untuk mengembangkan peserta didik.

Pendidikan kesetaraan Paket C merupakan suatu program pendidikan nonformal yang setara dengan sekolah SMA/SMK/MA, yaitu ijazah lulusan pendidikan kesetaraan Paket C diakui oleh pemerintah pusat maupun daerah. Sedangkan pengertian Paket C dalam buku terbitan Direktorat kesetaraan SMA/SMK dan MA, bagi siapapun yang terkendala pendidikan formal atau berminat memilih pendidikan kesetaraan.

Dalam pelaksanaan di lapangan kesetaraan pendidikan Paket C menjaga mutu tentu menemukan perbedaan dengan sekolah formal lainnya, sekolah nonformal memiliki banyak tantangan yang lebih dari sekolah formal

mulai dari terbatasnya waktu sebagian peserta untuk mengikuti proses belajar mengajar, di sini lah guru atau tenaga pendidik harus mencari jalur efektif dalam pembelajaran agar peserta didik di sekolah nonformal menjadi menarik efektif dan efisien. Dan yang kita ketahui pada tahun ini negara kita dilanda Pandemi Covid 19, tentu saja itu menghambat proses belajar sekolah nonformal yakni pusat kegiatan belajar mengajar harus memiliki strategi jitu untuk menarik minat masyarakat baik untuk mengikuti program paket, maupun strategi untuk pembelajaran agar menyenangkan dan diikuti oleh peserta didik.

Adapun penelitian yang terkait mengenai pendidikan kesetaraan Paket C, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Desmawati, Suminar, dan Budiarti (2017) mengenai Penerapan contoh pendidikan kecakapan hidup dari program pendidikan kesetaraan di kota Semarang. Penerapan pendidikan kecakapan hidup dari sebuah program pendidikan kesetaraan pada awal mulanya sebagai muatan lokal yang lebih dipusatkan pada bidang kecakapan vokasi atau keterampilan untuk mendapatkan kerja. Kualifikasi kecakapan hidup peserta didik pada kejar Paket A, Paket B dan Paket C termasuk pada kategori cukup. Setelah penerapan contoh pendidikan kecakapan hidup yang terhubung dengan mata pelajaran, kemampuan tutor dalam membentuk program pembelajaran, dalam hal membentuk silabus dan menjelaskan sebuah materi kecakapan hidup dalam hal materi mata pelajaran, sebagian besar termasuk pada kategori baik atau tinggi. Kualifikasi kecakapan hidup peserta didik pada kejar Paket A belum mengalami peningkatan yang signifikan, namun pada kejar Paket B dan C terjadi peningkatan.

Kedua, penelitian dilakukan oleh Munandar, Nurdin, dan Bahri (2019) mengenai Implementasi sekolah paket C di polewali Mandar. Dari fakta yang telah ada, implementasi pendidikan kesetaraan di PKBM Wahyuri masih termasuk dalam kategori yang baik, dalam hal ini dapat dilihat dari adanya proses yang terjadi pembelajaran namun dari sarana dan prasarana masih belum cukup memadai, hal ini terlihat dari belum lengkapnya alat peraga tutor untuk digunakan dalam pengajaran, sehingga implementasi kebijakan program Paket C yang ada di PKBM Wahyuri sangat ingin keikutsertaan masyarakat untuk berpartisipasi.

Pelaksanaan program Paket C di PKBM Wahyuri kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar tergolong dalam kelompok baik. Dengan demikian terjadi karena kinerja PKBM telah berlangsung dengan baik sementara partisipasi warga belajar masih belum konsisten. Partisipasi warga belajar sangat mempengaruhi terhadap proses pelaksanaan program paket C. Partisipasi warga dalam kehadiran belum teratur, dikarenakan profesi pekerjaan yang dijalani warga belajar berbeda-beda, dengan jam aktivitas kerja yang tentu berbeda. Dengan demikian partisipasi warga belajar dalam keaktifan dalam proses pembelajaran, dalam keaktifan proses pembelajaran cukup tinggi. Kurangnya ketersediaan sumber belajar sehingga menyulitkan warga belajar bisa memperoleh acuan ketika sedang melakukan pembelajaran dalam keadaan kehadiran warga belajar, inilah yang menjadi faktor penghambat dalam menjalani pelaksanaan program pendidikan kesetaraan paket C di pusat kegiatan belajar mengajar Wahyuri. Dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan masih belum

cukup.

Ketiga, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Suhendra (2014) mengenai Implementasi kebijakan program kesetaraan paket C pada Lembaga pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) kecamatan Kaway 16 Kabupaten Aceh Barat. Dari fakta yang telah dilihat kualitas pendidikan PKBM Saree Tabina di Kaway 16 masih belum cukup baik untuk mutu keulusannya, hal ini disebabkan adanya berbagai hambatan, baik dari segi tidak cukup tersedia tutor yang memiliki kemampuan di bidang yang dibutuhkan, serta kurangnya daya serap warga belajar sehingga belum bisa optimal dalam hal menunjang proses yang optimal, sehingga : Implementasi kebijakan program paket C yang ada di PKBM Saree Tabina Kaway 16 sangat membutuhkan keikutsertaan masyarakat untuk ikutserta. Dalam pelaksanaannya pendidikan kesetaraan, masih perlu banyak yang harus dievaluasi agar mampu bersaing dengan sekolah formal masih.

Keempat penelitian artikel yang dilakukan oleh Dachofany (2018) Pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan non formal di metro Lampung Studi kasus PKBM al-Suroya. Pendidikan nonformal dan Informal pada dasarnya dan berkembang, berdasarkan falsafah pendidikan sepanjang hayat (*Life-Long Learning*) yang secara luas banyak melayani masyarakat/warga belajar di atas rata rata usia sekolah.

Pendidikan Non Formal khususnya Paket B dan Paket C terlihat untuk memenuhi suatu fungsi tersendiri untuk menjalankan kebutuhan masyarakat diluar sistem persekolahan, sasaran yang utama pendidikan nonformal bersifat fungsional setelah seseorang memenuhi pendidikan dasarnya. Pendidikan

nonformal mempunyai keragaman baik dalam jenis, satuan, proses penyelenggaraan maupun tujuan. Pendidikan memiliki peran penting dalam pembangunan nasional.

Melalui pendidikan yang baik, maka akan lahir manusia yang berada di Indonesia, yang mampu bersaing secara global, bercirikan *highcompetition*. Keberadaan Lembaga Pendidikan Non Formal untuk Paket B dan Paket di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) AI-Suroya sangat diinginkan oleh masyarakat terpenting bagi masyarakat yang berkeinginan melanjutkan pendidikan, dalam mengembangkan kemampuan minat, bakat serta pelatihan dikarenakan program ini dilaksanakan sesuai dengan kualifikasi kemampuan.

Berdasarkan observasi awal penulis tentang pendidikan kesetaraan Paket C pada manajemen mutu di pusat kegiatan belajar mengajar Wijaya Kusuma bahwa pendidikan terdapat beberapa hambatan dan tantangan yang dirasakan oleh pusat kegiatan belajar mengajar Wijaya Kusuma. Penulis sangat tertarik meneliti dikarenakan rasa ingin tahu yang kuat mengenai apa itu sekolah non formal, bagaimana peserta didik mengikuti proses kegiatan belajar mengajar, kesesuaian prosedur yang berlaku.

Setelah penulis melihat kondisi di lapangan menemukan warga belajar atau peserta didik banyak yang tidak mengikuti proses kegiatan belajar mengajar, oleh karena itu bisa berakibat menurunnya terhadap mutu lulusan dari pusat kegiatan belajar masyarakat tersebut. Atas dasar fenomena tersebut, penulis sangat yakin melakukan penelitian ini dikarenakan kondisi lapangan saling berkaitan dengan judul penelitian ini. Pada penelitian ini penulis fokus melihat bagaimana

penerapan kebijakan manajemen mutu kesetaraan pendidikan paket C pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Wijaya Kusuma Kota Jambi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1.2.1 Bagaimana penerapan manajemen mutu pendidikan kesetaraan Paket C dalam menjaga manajemen mutu di pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) Wijaya Kusuma di Kota Jambi?

1.2.2 Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan manajemen mutu pendidikan kesetaraan Paket C dalam menjaga manajemen mutu di pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) Wijaya Kusuma?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengenai yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1.3.1 Untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan manajemen mutu pendidikan kesetaraan Paket C di PKBM Wijaya Kusuma Kota Jambi.

1.3.2 Untuk mendeskripsikan faktor – faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan manajemen mutu pendidikan kesetaraan paket C di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Wijaya Kusuma.

1.4 Batasan Masalah

Penelitian ini dilaksanakan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Wijaya Kusuma yang beralamat di Jl.Binakarya, Payo Selincih, Kec. Jambi Timur, Kota

Jambi. Indikator pendidikan nonformal Paket C merupakan program pendidikan nonformal menjadi alternatif dari Dinas Pendidikan yang diperuntukkan untuk pelajar yang putus sekolah maupun yang dunya tidak sempat menikmati pendidikan formal SMA sebab seperti sibuk kerja, olahragawan, wiraswasta maupun keterbatasan yang lainnya.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak diraih, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan mengenai Kota Jambi atau manfaat baik yang bersifat teoritis maupun praktis.

a) Bagi mahasiswa

Manfaat penelitian ini bagi mahasiswa adalah supaya menambah pandangan mahasiswa terkait dengan kebijakan pendidikan kesetaraan.

b) Bagi Lembaga

Manfaat bagi Lembaga-Lembaga pendidikan nonformal diharapkan bisa memberikan sebuah informasi serta dapat dipakai sebagai pijakan maupun rujukan dalam pengembangan program khususnya kebijakan pendidikan kesetaraan paket C pada manajemen mutu di PKBM Wijaya Kusuma.

c) Bagi penelitian selanjutnya

Manfaat penelitian bagi peneliti selanjutnya sebagai menjadi bahan rekomendasi kepada semua pihak yang bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kebijakan pendidikan kesetaraan.